
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI GORONTALO

Siti Ayu Budiarto¹, Sri Indriani S Dai², Ivan Rahmat Santoso³, Yenni Mulyati⁴

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail ¹: ayubudiarto839@gmail.com

Abstract: *This study is to determine the influence of economic growth, unemployment rate and poor population on income inequality in Regencies/Cities in Gorontalo Province partially and simultaneously. This research is quantitative research. The source of data in this study is secondary data obtained through the Central Statistics Agency (BPS) website using data from 2011-2022. The data analysis in this study is multiple regression of panel data. The results of the study show that (1) Economic growth has a negative and significant effect on the income inequality of districts/cities in Gorontalo Province.*

Keywords: *Gini Ratio; inequality, economic growth; Unemployment, Poverty*

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo secara parsial maupun simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data tahun 2011-2022. Analisis data dalam penelitian ini yakni regresi berganda data panel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci: Gini Ratio; Ketimpangan; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Kemiskinan

PENDAHULUAN

Ketimpangan dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Karena itulah tidaklah mengherankan bila pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region). Ketimpangan pembangunan dapat dilihat secara vertikal yaitu perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yaitu perbedaan antar daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008) dilihat Reza, 2018:53). Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (growth) telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sejumlah prestasi pun banyak yang diraih (Damiana & Sirojuzilam, 2013). Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan proses pembangunan. Hal ini menyebabkan pemerintah menetapkan laju pertumbuhan dalam perencanaan dan tujuan pembangunan. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pendapatan (Utari, 2015:1).

Masyarakat atau daerah yang memiliki faktor produksi yang rendah kurang mendapat kesempatan sehingga tidak mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari perbedaan dalam distribusi pendapatan yang cukup besar. (Mardianadan Basri, 2012) dilihat dalam Utari, 2015:2). Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tetapi dari sisi social tidak semua masyarakat Indonesia bisa merasakan atau menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, mereka tidak bias memenuhi kebutuhan mereka sehingga terjadilah ketimpangan ekonomi antar daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang berpotensi mempengaruhi ketimpangan adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya memiliki pekerjaan dengan upah rendah akan cenderung memiliki pendapatan yang rendah. Pengangguran juga dapat menciptakan tekanan ekonomi di berbagai tingkat, termasuk keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hal pendapatan dan akses terhadap sumber daya.

Tiap Negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Nanga (2005) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001). Tingkat pengangguran menunjukkan persentase individu-individu yang ingin bekerja tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dengan angkatan kerja. Seseorang dianggap menganggur jika tidak bekerja namun menunggu untuk mendapatkan pekerjaan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi ketimpangan yakni jumlah penduduk miskin, dimana menurut Dedy (2018) bahwa Jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan yang tinggi adalah indikator yang jelas dari ketimpangan pendapatan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki pendapatan yang jauh di bawah rata-rata, sementara kelompok lain dapat mencapai

pendapatan yang jauh lebih tinggi. Kemiskinan yang berkepanjangan dapat menciptakan ketidaksetaraan yang persisten dalam masyarakat dan menghambat mobilitas sosial, di mana keluarga yang miskin sulit untuk naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi.

Gorontalo sebagai salah satu propinsi di pulau Sulawesi yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Gorontalo memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan tersebut ke arah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sector-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif disetiap daerah untuk dikembangkan.

Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agrerat, koefisien gini diambil dari nama ahli statistika Italia yang bernama C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1912. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (Kemerataan Sempurna) sampai 1 (Ketidakmerataan Sempurna). Koefisien gini ketidak merataan sedang berkisar 0,36 – 0,49, ketidak merataan tinggi berkisar 0,50 – 0,70 dan ketidak merataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35. (Arsyad, 2010:291) dalam Dedy, 2018: 4).

Table 1: Rasio Gini di Provinsi Gorontalo (persen) 2011-2022

Periode	Persentase Gini Ratio									
	2022 2012	2021 2011	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Maret	0.418 0.437	0.408 0.459	0.408	0.407	0.403	0.430	0.419	0.420	0.412	0.437
Sept	0.423 0.413	0.409 0.400	0.406	0.410	0.417	0.405	0.410	0.401	0.453	0.445
Rata-Rata	0.421 0.425	0.409 0.430	0.407	0.409	0.410	0.418	0.415	0.411	0.433	0.441

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Dilihat pada table 1.1 dapat dijelaskan bahwa, dalam 12 tahun terakhir ini, Provinsi Gorontalo mengalami ketidakstabilan atau naik turun, persentase terbesar gini ratio itu pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,441. Dan pada tahun 2020, Provinsi Gorontalo tergolong ketidakmerataan sedang karena memiliki angka persentase sebesar 0,407. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah jumlah produksinya. Namun disisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang ada pada setiap daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat.

Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumber daya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumber daya potensial yang telah berpindah tersebut.

Jika dilihat dari keseluruhan rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih terbilang tinggi. Dilihat dari beberapa daerah yang berada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo yang memiliki persentase tertinggi penduduk miskinnya. Provinsi Gorontalo ini merupakan provinsi yang termiskin di antara provinsi-provinsi lainnya yang berada di Pulau Sulawesi. Selain itu, Gorontalo juga memiliki masalah tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Tingginya tingkat pengangguran di beberapa provinsi menjelaskan bahwa masih terdapat factor produksi yang belum digunakan secara optimal dalam menunjang pembangunan. Rendahnya partisipasi tenaga kerja yang terlihat dari TPT serta rendahnya PDRB perkapita di beberapa daerah akan berdampak tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang terhambat tentunya akan mempengaruhi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan fenomena diatas, untuk membuktikan sejauhmana pengaruh masing-masing variabel dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul analisis factor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo.

METODE

Objek dalam penelitian ini adalah Provinsi Gorontalo dengan lokasi penelitian Kabupate/kota di Provinsi Gorontalo. Di provinsi Gorontalo terdapat lima kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan sejak Juni 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data tahun 2011-2022. Analisis data dalam penelitian ini yakni regresi berganda data panel.

HASIL

A. Statistik Deskriptif

Deskripsi dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo periode 2011-2022:

Tabel 2: Karakteristik Variabel Penelitian

	GR	EG	EMP	POV
Maximum	0.441000	7.930000	7.350000	22.43000
Minimum	0.407000	-0.210000	1.380000	5.450000
Mean	0.418750	5.780139	4.063472	16.89250
Std. Dev.	0.010698	2.403869	1.426408	5.272867

Sumber: Pengolahan Data Eviews 9, 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat statistik deskriptif untuk masing-masing variabel berikut ini:

1. Ketimpangan pendapatan

Nilai minimum dari ketimpangan pendapatan sebesar 0,407 yakni pada tahun 2020 yang dikarenakan berbagai dampak dari Pandemi Covid-19 dan nilai Maximum sebesar 0,441 yang dikarenakan adanya berbagai kenaikan barang pada masa tahun 2013 tersebut. Nilai rata-rata ketimpangan pendapatan lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga data ketimpangan pendapatan mampu dijustifikasi dengan nilai rata-rata atau dalam hal ini ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo cenderung stabil.

2. Pertumbuhan ekonomi

Nilai minimum dari pertumbuhan ekonomi sebesar -0,21% yang terjadi pada tahun 2020 yang dikarenakan berbagai gejala penurunan daya beli konsumen hingga berbagai aspek masalah selama pandemi Covid-19 dan nilai Maximum sebesar 7,93% yakni pada tahun 2014 di Kota Gorontalo yang dikarenakan adanya berbagai investasi yang masuk dan memberkan manfaat pada Kota Gorontalo. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga data pertumbuhan ekonomi mampu dijustifikasi dengan nilai rata-rata atau dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tidak begitu fluktuatif kecuali pada saat terjadi pandemi Covid-19.

3. Pengangguran

Nilai minimum dari tingkat pengangguran sebesar 1,38% yakni pada Kabupaten Pohuwato tahun 2013 yang dikarenakan beragamnya usaha dan lapangan pekerjaan yang masuk di Kabupaten Pohuwato membuat masyarakat pada umur produktif cenderung bekerja dan nilai Maximum sebesar 7,35% yakni pada Kota Gorontalo yang berarti bahwa banyak masyarakat Kota Gorontalo yang masuk dalam usia produktif namun belum bekerja. Nilai rata-rata tingkat pengangguran lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga data tingkat pengangguran mampu dijustifikasi dengan nilai rata-rata atau dalam hal ini tingkat pengangguran setiap tahunnya yakni 2011-2022 terjadi dengan jumlah yang cukup konsisten.

4. Penduduk miskin

Nilai minimum dari penduduk miskin sebesar 5,45% yakni pada Kota Gorontalo tahun 2019 yang berarti bahwa adanya penurunan penduduk miskin pada tahun tersebut dan nilai Maximum sebesar 22,43% yakni pada Kabupaten Pohuwato tahun 2015. Nilai rata-rata penduduk miskin lebih besar dibandingkan standar deviasi atau simpangan baku, sehingga data penduduk miskin mampu dijustifikasi dengan nilai rata-rata atau dalam hal ini data penduduk miskin cenderung stabil. Peningkatan dan penurunan penduduk miskin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga reduksi kemiskinan ekstrim menjadi suatu program yang mampu mencegah adanya ketimpangan pendapatan pada Masyarakat

B. Persamaan Regresi Berganda

Hasil analisis dengan bantuan program E-Views 9 ditampilkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: GR
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 08/25/23 Time: 12:12
Sample: 2011 2022

Periods included: 12
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 72
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.386487	0.018708	20.65920	0.0000
EG	-0.002287	0.001042	-2.194806	0.0319
EMP	0.002051	0.000615	3.337635	0.0014
POV	0.001758	0.001244	1.413247	0.1625

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.348188	Mean dependent var	0.422297
Adjusted R-squared	0.265418	S.D. dependent var	0.033792
S.E. of regression	0.009273	Sum squared resid	0.005417
F-statistic	4.206699	Durbin-Watson stat	1.260976
Prob(F-statistic)	0.000440		

Sumber: Eviews versi 9, 2023

Berdasarkan angka pada kolom *Unstandardized Coefficients*, maka persamaan regresi berganda yakni sebagai berikut ini:

$$\hat{Y} = 0,3864 - 0,0022X_1 + 0,0020X_2 + 0,0017X_3 + e$$

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,265418. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 26,542% variabilitas ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 73,458% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi, kebijakan fiskal, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pembangunan daerah tidak merata, dan mobilitas sosial rendah.

2. Hasil Pengujian Serempak

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga hipotesis diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan penduduk miskin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

3. Pengujian Parsial

1) Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0319 < 0,05$), maka H_{a1} yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien negatif bermakna bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan efek baik dalam mereduksi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

2) Pengaruh tingkat pengangguran terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi tingkat pengangguran lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0014 < 0,05$), maka H_{a2} yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

4. Pengujian Parsial

1). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0319 < 0,05$), maka H_{a1} yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien negatif bermakna bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan efek baik dalam mereduksi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

2). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi tingkat pengangguran lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0014 < 0,05$), maka H_{a2} yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

3) Pengaruh Penduduk miskin Terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi Penduduk miskin lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai ($0,1625 > 0,05$), maka H_{a3} yang menyatakan bahwa penduduk miskin berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) penduduk miskin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah maka akan membuat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo akan mengalami kenaikan.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien negatif bermakna bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan efek baik dalam mereduksi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Melalui hasil ini maka penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk melakukan identifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di wilayah Gorontalo, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri kreatif, kemudian memfokuskan kebijakan dan program pada sektor tersebut. Kemudian membuat lingkungan yang ramah investasi dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif kepada investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Gorontalo serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sosial ekonomi dan ekologi.

Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat (Putro, 2010: 24). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi Memberikan Dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini mendukung suatu pernyataan yang mengatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan hal inilah yang akan mendorong daerah untuk mengelokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan rata-rata masyarakat juga cenderung meningkat. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan jika pendapatan masyarakat yang lebih rendah tumbuh lebih cepat daripada pendapatan masyarakat yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar. Ketika ada lebih banyak pekerjaan dan investasi dalam sektor-sektor tertentu, masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke peluang kerja dan pendidikan. Ini dapat membantu kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat memberikan pemerintah lebih banyak sumber daya untuk menginvestasikan dalam infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini dapat membantu kelompok yang lebih rentan dan berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

B. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pengangguran maka akan membuat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Melalui hasil ini maka penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk menciptakan program pelatihan keterampilan dan rekayasa pekerjaan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja serta bekerjasama dengan sektor swasta dalam program penyerapan tenaga kerja. Serta memberikan dukungan UMKM lokal dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas untuk membantu tumbuh dan menciptakan lapangan kerja

Ketika sebagian besar penduduk mengalami ketidakpastian pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, dampaknya sangat dirasakan dalam hal ketidaksetaraan pendapatan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja dengan mudah cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih rendah atau bahkan terpaksa mengandalkan pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak stabil. Sementara itu, sejumlah kecil orang yang berhasil mempertahankan atau memperoleh pekerjaan berkualitas mungkin mengalami peningkatan pendapatan (Syilviarani, 2017). Data tentang tingkat pengangguran digunakan untuk merencanakan kebijakan ekonomi, mengidentifikasi masalah dalam pasar tenaga kerja, dan menilai dampak kebijakan ekonomi tertentu pada lapangan kerja. Selain itu, tingkat pengangguran juga sering dibagi menjadi berbagai kategori, seperti pengangguran friksional (orang yang sedang mencari pekerjaan baru), pengangguran struktural (ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan permintaan pasar tenaga kerja), dan pengangguran musiman (yang terkait dengan fluktuasi musiman dalam pekerjaan).

Secara keseluruhan hasil ini sesuai dengan pendapat dari Cysne & Turchick (2012), Pi & Zhang (2018), dan Ukpere & Slabbert (2009) yang menemukan bahwa pengangguran meningkatkan ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi

cenderung meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja. Ketika banyak orang mencari pekerjaan, perusahaan cenderung memiliki lebih banyak kekuatan tawar dalam menentukan upah yang masyarakat bayar. Ini dapat mengakibatkan upah minimum yang lebih rendah dan, akibatnya, tingkat pendapatan yang rendah untuk pekerja dengan keterampilan rendah.

Deysnappriya (2017) mengatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan ketidaksetaraan kesempatan dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan atau yang memiliki jaringan sosial yang kuat mungkin lebih mampu mengatasi pengangguran, sementara masyarakat yang kurang beruntung bisa terperangkap dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan. Kebijakan pemerintah, seperti program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, dapat memoderasi dampak tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Program ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan memberikan bantuan kepada kelompok yang paling terpuak akibat pengangguran.

C. Pengaruh Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa penduduk miskin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah maka akan membuat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo akan mengalami kenaikan. Melalui hasil ini maka penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk merancang program kesejahteraan sosial yang berfokus pada kelompok yang paling rentan, seperti orang miskin, anak-anak, dan lanjut usia. Memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk vaksinasi, perawatan maternal dan anak, serta layanan kesehatan reproduksi serta mendukung pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi

Secara keseluruhan hasil ini sesuai dengan pendapat dari Apergis et al. (2011) yang mengatakan bahwa kemiskinan berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, penelitian Hassan et al. (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Andiny & Mandasari (2017) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variable ketimpangan pendapatan. Orang-orang miskin seringkali terpaksa mengambil utang dengan suku bunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mendanai pendidikan. Hal ini dapat membuat masyarakat semakin terperangkap dalam kemiskinan karena sebagian besar pendapatan masyarakat digunakan untuk membayar utang, meningkatkan ketimpangan pendapatan di antara masyarakat dan masyarakat yang tidak memiliki utang signifikan.

Kemiskinan dapat membatasi akses individu ke pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan potensi pendapatan. Orang-orang miskin mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengakses pendidikan berkualitas atau pelatihan keterampilan, yang dapat menyebabkan masyarakat tetap dalam pekerjaan dengan upah rendah. Kemiskinan dalam satu generasi dapat mempengaruhi generasi berikutnya, menciptakan siklus kemiskinan. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan atau peluang ekonomi, masyarakat cenderung mewarisi kemiskinan dari orang tua masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan ketimpangan pendapatan antar-generasi. Kebijakan pemerintah dan program jaringan pengaman sosial memiliki potensi untuk mengurangi dampak kemiskinan pada ketimpangan pendapatan. Program seperti bantuan tunai, pangan, dan perumahan dapat membantu mengangkat orang-orang dari kemiskinan, sehingga mengurangi ketimpangan.

Jika program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial berhasil diimplementasikan, penduduk miskin dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, jika akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan layak terbatas, penduduk miskin mungkin terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dipecahkan. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan menjadi sangat penting. Kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil, memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah. Program-program bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan juga dapat memainkan peran dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan penduduk miskin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dengan nilai koefisien determinasi sebesar 26,542%. Sedangkan sisanya sebesar 73,458% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi, kebijakan fiskal, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pembangunan daerah tidak merata, dan mobilitas sosial rendah. Melalui hasil ini maka penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk mempertimbangkan pengenalan kebijakan pendapatan minimum yang adil untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pembentukan koperasi dan asosiasi yang dapat membantu masyarakat lokal mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta menyediakan program pendidikan keuangan untuk membantu masyarakat mengelola uang masyarakat dengan lebih baik dan memahami cara menginvestasikan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat memberikan dampak positif pada tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan rata-rata cenderung meningkat, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan jika pendapatan masyarakat yang lebih rendah tumbuh lebih cepat daripada pendapatan masyarakat yang lebih tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan meningkat karena individu yang

menganggur memiliki pendapatan nol. Ketika pengangguran tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, ini dapat mengakibatkan peningkatan ketimpangan. Jumlah penduduk miskin yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat berkontribusi pada tingkat ketimpangan pendapatan. Jika penduduk miskin memiliki akses yang terbatas ke peluang ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi, ini dapat menyebabkan ketimpangan yang lebih besar.

Secara keseluruhan hasil ini sesuai dengan pendapat dari Hindun, dkk (2019) & Octavia (2021) bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk miskin adalah faktor-faktor penting yang dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan jika pertumbuhan itu bersifat inklusif. Inklusif berarti bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Ini dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi diiringi oleh penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan tekanan pada upah karena penawaran tenaga kerja yang berlebihan. Ini dapat menghasilkan upah yang lebih rendah untuk pekerja, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterampilan rendah. Jumlah penduduk miskin dalam suatu negara secara langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Semakin banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, semakin besar ketimpangan pendapatan. Orang-orang miskin memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah daripada rata-rata, dan jumlah masyarakat yang besar dapat meningkatkan kesenjangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien negatif bermakna bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan efek baik dalam mereduksi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
2. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pengangguran maka akan membuat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan.
3. Penduduk miskin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah maka akan membuat ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo akan mengalami kenaikan.
4. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan penduduk miskin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dengan nilai koefisien determinasi sebesar 26,542%. Sedangkan sisanya sebesar 73,458% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi, kebijakan fiskal, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pembangunan daerah tidak merata, dan mobilitas sosial rendah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk melakukan identifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di wilayah Gorontalo, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri kreatif, kemudian memfokuskan kebijakan dan program pada sektor tersebut. Kemudian membuat lingkungan yang ramah investasi dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif kepada investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Gorontalo serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sosial ekonomi dan ekologi
2. Penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk menciptakan program pelatihan keterampilan dan rekayasa pekerjaan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja serta bekerjasama dengan sektor swasta dalam program penyerapan tenaga kerja. Serta memberikan dukungan UMKM lokal dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas untuk membantu tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
3. Penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk merancang program kesejahteraan sosial yang berfokus pada kelompok yang paling rentan, seperti orang miskin, anak-anak, dan lanjut usia. Memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk vaksinasi, perawatan maternal dan anak, serta layanan kesehatan reproduksi serta mendukung pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.
4. Penting bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo untuk mempertimbangkan pengenalan kebijakan pendapatan minimum yang adil untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pembentukan koperasi dan asosiasi yang dapat membantu masyarakat lokal mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta menyediakan program pendidikan keuangan untuk membantu masyarakat mengelola uang masyarakat dengan lebih baik dan memahami cara menginvestasikan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, A., Rantung, V. P., & Marshdeh, H. (2017). Determinants of Income Inequality. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 159–171.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 196–210.
- Apergis, N., Dincer, O., & Payne, J. E. (2011). On the Dynamics of Poverty and Income. *Journal of Economics Studies*, 38(2),

132–143.

- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bandyopadhyay, S. (2017). The Absolute Gini Is A More Reliable Measure Of Inequality For Time Dependent Analyses (Compared With The Relative Gini). *Economics Letters*, 162, 1–15.
- Banerjee, A. K. (2010). A Multidimensional Gini Index. *Mathematical Social Sciences*, 60(2), 87–93.
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28.
- Cysne, R. P., & Turchick, D. (2012). Equilibrium Unemployment-Inequality Correlation. *Journal of Macroeconomics*, 34(2), 454–469.
- Danim, S. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dartanto, T., & Putra, N. E. (2018). Ketimpangan Kesempatan Jadi Penyebab Ketimpangan Pendapatan. Retrieved January 28, 2019, from www.feb.ui.ac.id
- Deyshappriya, N. P. R. (2017). Impact of Macroeconomic Factors on Income Inequality and Income Distribution in Asian Countries (No. 696). Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Efriza, U. (2014). Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2).
- Fithrian, M., Syechalad, N., & Nasir, M. (2015). Analisis Pengaruh Agregat Demand dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 23–32.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregorio, J. D. (2002). Education And Income Inequality: New Evidence From Cross-Country Data. *Review of Income and Wealth*, 48(3), 395–416.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1), 57–71.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics an Asian* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Meisami, S. B. H. (2010). An Empirical Investigation of The Effects of Health and Education on Income Distribution and Poverty in Islamic Countries. *International Journal of Social Economics*, 37(4), 293–301.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Nielson, F., & Alderson, A. S. (2015). The Kuznets Curve and The Great U-Turn: Income Inequality in U.S. Counties, 1970 To 1990. *American Sociological Review*, 62(1), 12–33.
- Octavia, H. S. (2021). Analisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan (studi kasus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Petcu, C. (2014). Does Educational Inequality Explain Income Inequality Across Countries? Retrieved from http://digitalcommons.iwu.edu/econ_honproj/125
- Pi, J., & Zhang, P. (2018). Structural Change And Wage Inequality. *International Review of Economics and Finance*, 58(C), 699–707. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.07.010>
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (3th ed.). Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Sanz, R., Peris, J. A., & Escámez, J. (2017). Higher Education in The Fight Against Poverty From The Capabilities Approach: The Case of Spain. *Journal of Innovation & Knowledge*, 2(2), 53–66.
- Shahpari, G., & Davoudi, P. (2013). Studying Effects of Human Capital on Income Inequality in Iran. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(2014), 1386–1389.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Informasi*, 16(3), 213–219.
- Sylviarani, A. T. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ukperu, W. I., & Slabbert, A. D. (2009). A Relationship Between Current Globalisation, Unemployment, Inequality and Poverty. *International Journal of Social Economics*, 36(1–2), 37–46.
- Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2016). Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 110–125.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Wiratmini, N. P. E. (2018). Paling Rendah Di Indonesia, Pengangguran di Bali Hanya 36.000. Retrieved January 31, 2019, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20180124/78/730043/pali-renda-di-indonesiapengangguran-di-bali-hanya-36.000>
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The Impact of Education on Income Inequality And Intergenerational Mobility. *China Economic Review*, 37(C), 110–125